

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA  
BAGI HASIL DAN BELANJA DAERAH TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN**

**DKI JAKARTA**



**SKRIPSI**

Untuk memenuhi sebagian persyaratan  
mencapai derajat Sarjana S-1

Program Studi

Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

**ANDYKA ARIEF PRATOMO**

**C2B008079**

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**SEMARANG**

**2015**

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM,  
DANA BAGI HASIL DAN BELANJA DAERAH TERHADAP TINGKAT  
KEMISKINAN DKI JAKARTA**



**SKRIPSI**

Untuk memenuhi sebagian persyaratan  
mencapai derajat Sarjana S-1

Program Studi

Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

**ANDYKA ARIEF PRATOMO**

**C2B008079**

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**SEMARANG**

**2015**

## **PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama Penyusun : Andyka Arief Pratomo  
Nomor Induk Mahasiswa : C2B008079  
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/IESP  
Judul Skripsi : **“PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH,  
DANA ALOKASI UMUM, DANA BAGI HASIL  
DAN BELANJA DAERAH TERHADAP TINGKAT  
KEMISKINAN DKI JAKARTA”**  
Dosen Pembimbing : Drs. R. Mulyo Hendarto, MSP.

Semarang, 9 Pebruari 2015

Dosen Pembimbing

(Drs. R . Mulyo Hendarto, MSP)

NIP. 196104161987101001

## **PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN**

Nama Mahasiswa : Andyka Arief Pratomo  
Nomor Induk Mahasiswa : C2B008079  
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/IESP  
Judul Skripsi : **“PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH,  
DANA ALOKASI UMUM, DANA BAGI HASIL  
DAN BELANJA DAERAH TERHADAP  
TINGKAT KEMISKINAN DKI JAKARTA”**

**Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal .....2015**

Tim Penguji

1. Drs. R. Mulyo Hendarto, MSP. (.....)
2. Dr. Nugroho SBM, MSP. (.....)
3. Fitrie Arianti, S.E., M.Si. (.....)

## **PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Andyka Arief Pratomo, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil dan Belanja Daerah Terhadap Kemiskinan di DKI Jakarta adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis lainnya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 9 Pebruari 2015

Yang membuat pernyataan

Andyka Arief Pratomo

## **MOTTO**

*Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan. Karena itu bila kau sudah selesai (mengerjakan yang lain). Dan berharaplah kepada Tuhanmu*

*(Q.S Al Insyirah : 6-8)*

*Mustahil adalah bagi mereka yang tidak pernah mencoba*

*(Jim Goodwin)*

*Orang yang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kesukaran, tantangan dan air mata.*

*(Dahlan Iskan)*

## **PERSEMBAHAN**

*Skripsi ini dengan bangga aku persembahkan untuk Ayah dan Bundaku tercinta dan adikku tersayang yang berada di Jakarta.*

## **ABSTRAK**

Tingkat kemiskinan di DKI Jakarta yang memiliki Pendapatan Asli Daerah yang tinggi, status sebagai Ibukota Negara ternyata tidak mampu menurunkan angka kemiskinan secara kontinyu. Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil dan Belanja Daerah di Propinsi DKI Jakarta

Menggunakan alat analisis regresi linear berganda. Data yang digunakan adalah data sekunder dan merupakan data kuantitatif. Data diperoleh melalui dokumentasi dari data-data yang dimiliki Badan Pusat Statistik DKI Jakarta. Data yang digunakan adalah data time series, dalam kurun waktu 12 tahun dengan program *evIEWS*.

Hasil pengujian pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemiskinan tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap angka kemiskinan. Hasil pengujian pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Kemiskinan terdapat pengaruh negatif dan signifikan terhadap angka Kemiskinan. Hasil pengujian pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Kemiskinan tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap Kemiskinan. Hasil pengujian pengaruh Belanja Daerah terhadap Kemiskinan tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap Kemiskinan. Koefisien determinasi menunjukkan besarnya pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap angka kemiskinan.

Kata kunci: kemiskinan, pendapatan asli daerah, otonomi daerah

## **ABSTRACT**

*Poverty rate in DKI Jakarta which the high regional revenue, as capital city can not reduce poverty rate continuously. This research aims to estimate regional revenue effect, general allocation fund, revenue sharing fund and region expenditure.*

*Used the multiply analysis regrestion. Used the secondary data, quantitative data. Data is gotten from documented Badan Pusat Statistik DKI Jakarta. Used time series data, with 12 years observation by eviews program.*

*The result test of regional revenue effect against poverty is not significant. The result test of revenue sharing fund effect against poverty is negative and significant. The result test of general allocation fund effect against poverty is not significant. The result test of region expenditure against poverty is not significant. Coefficient determination shows the extent independent variable together against poverty.*

*Keyword: poverty, regional revenue, regional autonomy*



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas karunia-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil dan Belanja Daerah Terhadap Tingkat Kemiskinan Propinsi DKI Jakarta”*. Penulisan skripsi ini disusun dalam rangka menyelesaikan tugas akhir sebagai syarat kelulusan program Sarjana (S1) Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

Skripsi ini adalah karya yang tidak dapat penulis selesaikan tanpa adanya bantuan, ketulusan, keramahan serta kebaikan dari beberapa pihak. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Suharnomo, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
2. Dr. Hadi Sasana, S.E., M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan.
3. Ibu Mayanggita Kirana, S.E., M.Si., selaku dosen wali yang telah memberikan waktu, memotivasi dan mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak R. Mulyo Hendarto, S.E., M.Si., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan waktu, penuh kesabaran dalam membimbing,

memotivasi dan mengarahkan penulis. Arahan dan bimbingan yang sangat bermanfaat untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Ibu Evi Yulia Purwanti, S.E., M.Si., terima kasih atas bimbingan dan kesabaran yang Ibu berikan dalam menghadapi penulis.
6. Ayahanda Teguh Minarno, S.E. dan Ibunda Sutinah, S.pd.SD tercinta yang senantiasa memberikan kasih sayang yang tak terbatas. Doa yang tulus selalu diucapkan, dukungan, motivasi dan teguran yang selalu diberikan sehingga menjadikan penulis tidak mudah menyerah dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi Orang Tua yang luar biasa untuk kami anak-anakmu.
7. Adikku tersayang Anggraini Dwi Pratiwi yang selalu memberikan dukungan tiada henti kepada penulis, selalu belajar bagaimana menjadi adik yang sayang kepada kakaknya. Terima kasih telah menjadi adik, dan sahabat bagi penulis.
8. Sahabatku Eggy, Adam, Saut, dan Mugi, terima kasih telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dan terima kasih juga sudah menemani disaat susah maupun senang, disaat kiriman datang dan pergi begitu saja. See you at the top guys!
9. Ditha Rizki Lestari, S.E., Akt., skripsi ini tak akan selesai jika tidak ada kamu yang memberikan semangat, dukungan, motivasi dan arahan. Terima kasih telah menemaniku susah dan senang, jatuh dan bangkit, dan pada saat

segalanya menjauh. Terima kasih untuk kesabaran yang luar biasa menunggu penulis hingga kamu mencapai dua gelar.

10. Arya Simanungkalit, terima kasih telah memberikan bimbingan dan bantuan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman Unnes, Monick dan Fatma, terima kasih telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
12. Teman-teman kos Wisma Merdeka, Yoga, Teo, Hafiz, Hari, Satrio, Tegar, Mamat, Wahyu. Terima kasih telah mengisi hari-hari di Semarang dengan senyuman dan candaan, terima kasih telah mengajarkan banyak hal baru selama penulis berada di Semarang.
13. Teman-teman kontrakan Singosari, Abeng, Jawa, Brian, Rekha, Akmal, Rama, Pitak. Terima kasih telah bersedia tinggal satu atap selama dua tahun,akhirnya bisa menyusul kalian juga lulus.
14. Teman-teman Superdamn squad, Johan, Al, Pekim, Bara, Aju, Gama, Jabbar, Barjo, Ridho, Evan, Zendi, Metha, Tia, Vita, Ojay, Idel, dan Sony, terima kasih telah banyak memberikan penulis pelajaran hidup, betapa pentingnya hidup untuk dinikmati.
15. Teman-teman IESP angkatan 2008, terima kasih sekian tahun kita bersama untuk mengejar impian kita masing-masing.
16. Teman-teman Radio Prambors Semarang. Terima kasih sudah mengijinkan penulis mengerjakan skripsi di kantor.

17. Teman-teman Radio Imelda Semarang. Terima kasih telah memberikan banyak pengalaman hidup dan memberikan kesempatan untuk menjadi penyiar.
18. Teman-teman KKN TIM II UNDIP desa Gedangan kecamatan Welahan yang telah menemani 35 hari jauh dari gemerlapnya Semarang.
19. Terima kasih kepada segenap pihak yang telah banyak membantu proses pengerjaan skripsi ini.

Semarang, 9 Pebruari 2015

Penulis

Andyka Arief Pratomo

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
<i>ABSTRACT</i> .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR .....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	12
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	13
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	13
1.3.2 Kegunaan Penelitian .....	13
1.4 Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II TELAAH PUSTAKA .....</b>	<b>15</b>
2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu .....	15
2.1.1 Kemiskinan.....	15
2.1.2 Teori Lingkaran Setan Kemiskinan .....	16
2.1.3 Otonomi Daerah .....	17
2.1.4 Pendapatan Asli Daerah.....	21
2.1.5 Dana Alokasi Umum .....	27

2.1.6 Dana Bagi Hasil.....	30
2.1.7 Belanja Daerah .....	31
2.1.8 Penelitian Terdahulu.....	34
2.2 Kerangka Pemikiran .....	39
2.3 Hipotesis .....	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional .....	41
3.2 Jenis dan Sumber Data .....	42
3.3 Metode Pengumpulan Data .....	43
3.4 Metode Analisis.....	43
3.4.1 Deteksi Penyimpangan Asumsi Klasik.....	44
3.4.1.1 Deteksi Normalitas.....	44
3.4.1.2 Deteksi Multikolinearitas .....	44
3.4.1.3 Deteksi Autokorelasi.....	45
3.4.1.4 Deteksi Heteroskedastisitas.....	46
3.4.2 Pengujian Statistik.....	46
3.4.2.1 Koefisien Determinasi.....	46
3.4.2.2 Uji Signifikansi Simultan.....	47
3.4.2.3 Uji Signifikansi Individu.....	48
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>49</b>
4.1 Deskripsi Objek Penelitian .....	49
4.1.1 Pendapatan Asli Daerah.....	50
4.1.2 Dana Bagi Hasil.....	50
4.1.3 Dana Alokasi Umum .....	50
4.1.4 Alokasi Anggaran Belanja Daerah .....	50
4.1.5 Angka Kemiskinan .....	51
4.2 Hasil Analisis.....	51
4.2.1 Deteksi Penyimpangan Asumsi Klasik.....	51

4.2.1.1 Deteksi Normalitas.....	51
4.2.1.2 Deteksi Multikolinearitas .....	52
4.2.1.3 Deteksi Heteroskedastisitas.....	53
4.2.1.3 Deteksi Autokorelasi.....	54
4.3 Hasil Regresi.....	55
4.3.1 Uji Model .....	55
4.3.2 Koefisien Determinasi.....	56
4.3.3 Pengujian Hipotesis.....	57
4.4 Interpretasi Hasil Penelitian.....	58
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>64</b>
5.1 Kesimpulan.....	64
5.2 Keterbatasan Penelitian .....	64
5.3 Saran .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>66</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>68</b>

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	Jumlah Presentase penduduk Negara ASEAN yang Memiliki <i>Purchasing Power Parity</i> (PPP) di bawah \$1,25 dan \$2 ..... 4
Tabel 1.2	Jumlah dan Presentase penduduk miskin di DKI Jakarta..... 5
Tabel 4.1	Deskripsi Variabel Penelitian ..... 49
Tabel 4.2	Deteksi Multikolinearitas ..... 53
Tabel 4.3	Deteksi Heteroskedastisitas Glejser ..... 54
Tabel 4.4	Deteksi Autokorelasi Model Regresi..... 55
Tabel 4.5	Model Analisis..... 55
Tabel 4.6	Uji Model..... 56



## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Teori Lingkaran Setan Kemiskinan .....	17
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran.....	39
Gambar 3.1 Persamaan Model Regresi.....	43
Gambar 3.2 Deteksi Signifikansi Simultan.....	47
Gambar 3.3 Deteksi Signifikansi Individu.....	48
Gambar 4.1 Deteksi Normalitas <i>Jarque Berra</i> .....	52

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1    Jumlah PAD, DBH, DAU, Belanja Daerah dan Tingkat Kemiskinan propinsi DKI Jakarta.....	68
Lampiran 2    Hasil Analisis.....	69
Lampiran 3    Grafik <i>Jarque Berra</i> .....	73

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Tujuan dari didirikannya sebuah negara pada umumnya adalah untuk memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat atau penduduknya. Namun demikian dalam perjalanannya pemerintah akan dibayangi oleh permasalahan dasar dalam menciptakan kesejahteraan penduduknya yaitu kemiskinan. Demikian juga dengan yang terjadi di Indonesia, masalah kemiskinan masih menjadi topik yang penting untuk diteliti. Hal ini tak lepas dari masih relatif besarnya angka kemiskinan yang ada di Indonesia sebagai negara berkembang.

Beberapa upaya pemerintah telah dilakukan untuk menurunkan angka kemiskinan yang terjadi di Indonesia, salah satunya adalah dengan meletakkan dasar otonomi daerah yang lebih luas kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pertimbangan yang digunakan adalah bahwa Kabupaten/Kota merupakan wilayah yang relatif paling dekat dengan masyarakat.

Pada penerapan otonomi daerah terjadi pergeseran wewenang dan tanggung jawab dalam pengalokasian sumber daya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Otonomi daerah memberikan porsi kewenangan yang besar kepada pemerintah daerah untuk dapat mengelola keuangan daerahnya. UU No. 22 tahun 1999 tentang “Pemerintah Daerah” dan UU No. 25 tahun 1999 tentang “Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah” dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 (UU No. 32/2004) tentang Pemerintah Daerah yang merupakan

pembaruan dari UU sebelumnya menegaskan kewenangan Pemda untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi. Sebagai dampak tersebut, peran Pemda dalam penyediaan layanan publik dan pencapaian tujuan pembangunan nasional menjadi semakin besar. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya sistem pengendalian, evaluasi dan pengukuran kinerja yang sistematis untuk mengukur kemajuan yang dicapai Pemda.

Menurut Halim (2008), ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi adalah (1) kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan; (2) Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, oleh karena itu, PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Dengan diterapkannya otonomi daerah tersebut membawa konsekuensi akan adanya pelimpahan sebagian wewenang pemerintahan dari pusat ke daerah yang mencakup penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia sesuai dengan kewenangan yang diserahkan. Undang-Undang mengharapkan dengan otonomi dan pelimpahan wewenang tersebut pemerintahan daerah mempunyai peluang dan kesempatan yang lebih besar dalam meningkatkan kinerjanya yaitu dapat meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, yang pada akhirnya dapat menanggulangi kemiskinan di daerah.

Sejak dikeluarkannya UU mengenai otonomi daerah pada tahun 1999 hingga saat ini sudah berjalan lebih dari 14 tahun, nampaknya masih memberikan hasil yang belum begitu memuaskan. Angka kemiskinan Indonesia terlihat tiap tahun cenderung menurun, pada tahun 2003 tingkat kemiskinan di tingkat 17,42%, kemudian turun hingga pada tahun 2005 mencapai angka 15,97%. Tahun 2006 kembali mengalami kenaikan pada titik 17,75% dan kembali menurun hingga tahun 2012 pada angka 11,66%. Namun demikian dengan nilai 11,66% pada tahun 2012 dengan jumlah penduduk sebesar 244.775.796 jiwa pada tahun yang sama maka hal ini berarti bahwa setidaknya 28,4 juta jiwa penduduk di Indonesia yang berada pada kategori miskin. Hal ini tentunya masih menjadikan permasalahan mengenai kemiskinan dan upaya untuk terus menurunkannya masih terus dilakukan.

Permasalahan kemiskinan di Indonesia nampaknya juga masih menunjukkan masih relatif tinggi dibandingkan beberapa Negara ASEAN. Hasil Survey yang dirilis pada tahun 2011 yang menggambarkan perbandingan persentase penduduk yang memiliki pendapatan di bawah ini.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah persentase penduduk Negara ASEAN yang memiliki *Purchasing Power Parity* (PPP) di bawah \$1,25 dan \$2,0**

Country	PPP \$1.25	PPP \$2
Brunei Darussalam	NA	NA
Cambodia	25.8	57.8
Indonesia	29.4	54.6
Lao PDR	44.0	76.9
Malaysia	2.00	7.8
Myanmar	-	-
Philippines	22.6	45.0
Singapore	-	-
Thailand	2.00	11.5
Viet Nam	21.5	48.4

Sumber : ASEAN Community in Figures (ACIF) 2010

Tabel 1.1 tersebut menggambarkan bahwa kekuatan daya beli masyarakat Indonesia masih rendah dimana Indonesia hanya lebih baik dari Laos. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada penurunan jumlah kemiskinan, namun demikian jumlah tersebut masih cukup besar sehingga mengakibatkan daya beli penduduk juga masih relatif kecil dan jumlah penduduk dengan daya beli di bawah \$1,25 maupun di bawah \$2 masih besar. Beberapa teori telah meneliti mengenai kemiskinan, faktor yang mempengaruhi dan dampak yang diakibatkan oleh tingginya kemiskinan.

Dengan pemberian otonomi daerah yang luas seharusnya wilayah-wilayah yang relatif jauh dari ibukota Negara lebih memiliki peluang untuk

mengembangkan potensi daerahnya sendiri. Demikian juga daerah yang dekat dengan ibukota Negara seharusnya juga mampu meminimalkan angka kemiskinannya. Namun demikian kenyataanya permasalahan kemiskinan di Jakarta sebagai ibukota negara masih memiliki permasalahan yang cukup besar.

**Tabel 1.2**  
**Jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta (ribu jiwa)**

Kabupaten/Kota Adm.	Tahun					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kepulauan Seribu	2,9	2,6	2,4	2,7	2,47	2,6
Jakarta Selatan	76,3	71,1	73,7	78,4	71,84	74,1
Jakarta Timur	94,6	79,8	81,2	91,6	83,82	86,5
Jakarta Pusat	34,5	31,0	32,1	35,7	32,63	33,7
Jakarta Barat	85,2	72,9	74,0	87,2	79,71	82,3
Jakarta Utara	112,2	85,2	76,2	92,6	84,73	87,5
<b>DKI Jakarta</b>	<b>405,7</b>	<b>342,6</b>	<b>339,6</b>	<b>388,2</b>	<b>355,20</b>	<b>366,7</b>
<b>Persentase Penduduk Miskin Provinsi DKI Jakarta</b>						
Kabupaten/Kota Adm.	Tahun					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kepulauan Seribu	15,12	13,56	12,66	13,07	11,53	11,62
Jakarta Selatan	3,74	3,41	3,52	3,80	3,43	3,49
Jakarta Timur	4,02	3,39	3,42	3,40	3,06	3,12
Jakarta Pusat	3,99	3,58	3,68	3,97	3,56	3,72
Jakarta Barat	4,04	3,41	3,44	3,82	3,44	3,47
Jakarta Utara	7,95	6,02	5,34	5,62	5,07	5,14
<b>DKI Jakarta</b>	<b>4,48</b>	<b>3,86</b>	<b>3,80</b>	<b>4,04</b>	<b>3,64</b>	<b>3,70</b>

Sumber : BPS (Jakarta dalam Angka, 2013)

Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS tersebut menunjukkan bahwa penurunan angka kemiskinan yang terjadi di DKI Jakarta tidak terjadi secara linier berkelanjutan. Hal ini ditunjukkan dengan kondisi bahwa pada tahun 2008 dan 2009 terjadi penurunan angka kemiskinan dari 3,86% ke 3,80%. Namun pada tahun 2010 kembali terjadi kenaikan di angka 4,04%. Pada tahun 2011 terjadi

penurunan pada angka 3,64% dan pada tahun 2012 kembali terjadi kenaikan pada titik 3,70%. Hal ini mencerminkan bahwa keberhasilan menurunkan angka kemiskinan hanya terjadi pada periode yang pendek. Kondisi demikian menunjukkan bahwa angka kemiskinan di DKI Jakarta masih memiliki potensi kembali mengalami peningkatan. Wilayah Kepulauan Seribu memiliki angka kemiskinan yang paling tinggi di DKI Jakarta. Hal ini cukup dimaklumi karena lokasi Kepulauan Seribu yang secara geografis terpisah dengan laut. Wilayah Jakarta Utara menjadi daerah kedua di DKI Jakarta dengan angka kemiskinan yang tertinggi. Hal ini menjadi hal ironis karena Jakarta Utara adalah wilayah yang dekat dengan pusat pemerintahan.

Masalah kemiskinan tak lepas dari masalah kemampuan penduduk dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Hasil penelitian sebelumnya tersebut menggambarkan bahwa terdapat beberapa variabel yang berpengaruh terhadap kemiskinan yang diperoleh dari variabel mikro ekonomi maupun makro ekonomi. Satu hal yang menjadi titik awal penelitian ini adalah bahwa pemerintah baik pusat maupun daerah merupakan pihak yang memiliki otoritas untuk menjaga faktor mikro ekonomi maupun makro ekonomi menjadi kondusif. Intervensi pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan maupun meningkatkan jumlah lapangan kerja menjadi hal yang penting dilakukan.

Peran pemerintah termasuk pemerintah daerah dalam mempengaruhi kemiskinan termasuk dalam mengantisipasi kegagalan pasar dalam perekonomian sangat penting. Perannya melalui kebijakan fiskal ditargetkan dapat menyelesaikan masalah pembangunan (kemiskinan, pengangguran dan distribusi



pendapatan). Menurut Mankiw (2003) Kebijakan fiskal terdiri dari dua instrumen utama yaitu kebijakan pajak dan pengeluaran pemerintah. Peran pemerintah melalui kebijakan fiskal dengan tiga tujuan yang masing-masing memiliki tujuan yang berbeda-beda, yaitu:

1. Fungsi alokasi berhubungan dengan persediaan barang-barang sosial dan proses pemanfaatan sumber daya secara menyeluruh untuk produksi barang-barang swasta, barang sosial dan kombinasi dari barang sosial yang telah dipilih.
2. Fungsi distribusi berhubungan dengan persamaan kesejahteraan dan distribusi pendapatan dalam masyarakat.
3. Fungsi stabilisasi ditujukan untuk menstabilkan atau mempertahankan rendahnya tingkat pengangguran, harga atau tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang telah ditargetkan.

APBD yang mencakup pendapatan dan pengeluaran pemerintah daerah dapat digunakan sebagai cerminan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah dalam tiap pembelian barang dan jasa guna pelaksanaan suatu program mencerminkan besarnya biaya yang akan dikeluarkan pemerintah untuk melaksanakan program tersebut. Mardiasmo (2009: 63) menyatakan terdapat beberapa alasan pentingnya anggaran sektor publik yaitu: (a) Anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial-ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, (b) Anggaran diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumber daya (*scarcity of resources*), pilihan (*choise*) dan *trade offs*. (c) Anggaran

diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat. Dalam hal ini anggaran publik merupakan instrumen pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga publik yang ada.

Dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mencakup dua bagian penting yaitu anggaran pendapatan daerah dan anggaran belanja daerah. Belanja daerah merupakan pengalokasian dana yang harus dilakukan secara efektif dan efisien, karena tolok ukur keberhasilan pelaksanaan kewenangan daerah ditentukan oleh belanja daerah. Dengan adanya otonomi daerah, maka pemerintah dituntut untuk mengelola keuangan daerah secara baik dan efektif. Belanja daerah merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok Belanja Administrasi Umum. Kelompok belanja ini mencakup Jenis Belanja baik untuk bagian Belanja Aparatur Daerah maupun Pelayanan Publik. Sesuai aturan APBD dan tujuan otonomi daerah, bahwa hakikat Anggaran Daerah adalah merupakan alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, maka APBD harus benar-benar menggambarkan kerangka perangkaan ekonomis yang mencerminkan kebutuhan masyarakat untuk memecahkan masalahnya dan meningkatkan kesejahteraannya.

Untuk meningkatkan produktivitas perekonomian, peningkatan alokasi belanja daerah dalam bentuk aset tetap seperti infrastruktur dan peralatan sangat penting dan perlu ditingkatkan karena semakin tinggi belanja daerah semakin tinggi pula produktivitas perekonomian. Saragih (2003) menyatakan bahwa

pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal yang produktif seperti untuk melakukan aktivitas pembangunan. Sejalan dengan pendapat tersebut, Stine (1994) menyatakan bahwa penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program pelayanan publik. Kedua pendapat ini menyiratkan pentingnya mengalokasikan belanja untuk berbagai kepentingan publik.

Berdasarkan pasal 26 PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bagian keempat tentang Belanja Daerah ayat 1 menunjukkan bahwa belanja daerah digunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan propinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya di ayat 2 disebutkan bahwa belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk melindungi masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Namun demikian menurut rilis Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) dalam [www.seknasfitra.org](http://www.seknasfitra.org) (diakses Juni 2014) menunjukkan bahwa beban belanja pegawai pada APBN memang semakin berat. Pada RAPBN 2012, belanja pegawai merupakan alokasi belanja tertinggi, sebesar Rp. 215,7 triliun. Bahkan mengalahkan belanja subsidi yang selama ini mendominasi. Potret yang sama terjadi di daerah. Hasil analisa FITRA pada APBD 2011, terdapat 124 daerah yang beban belanja pegawainya melebihi 60% dan 16 daerah diantaranya mencapai 70%. Semakin besarnya anggaran belanja tidak langsung ini

menjadikan masyarakat kurang bisa merasakan dampak APBD secara optimal.

Komposisi anggaran idealnya harusnya berbalik, di mana belanja langsung bisa lebih besar. Komposisi anggaran yang tidak ideal dapat membuat pemerintah daerah sulit untuk melaksanakan pembangunan karena kurangnya dana untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, padahal dalam anggaran belanja daerah, pemerintah daerah juga mendapatkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat.

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Peningkatan PAD diharapkan meningkatkan investasi belanja daerah pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik. Fenomena yang terjadi adalah peningkatan pendapatan asli daerah tidak diikuti dengan kenaikan anggaran belanja daerah yang signifikan hal ini disebabkan karena pendapatan asli daerah tersebut banyak tersedot untuk membiayai belanja lainnya.

Berlakunya Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, membawa perubahan mendasar pada sistem dan mekanisme pengelolaan pemerintahan daerah. UU ini menegaskan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Pemda (Pemerintah Daerah), Pempus (Pemerintah Pusat) akan mentransferkan dana perimbangan kepada Pemda. Dana Perimbangan tersebut terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan

bagian daerah dari bagi hasil pajak pusat.

Dana Alokasi Umum (DAU) pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan (UU No. 32/2004). Dengan adanya transfer dana dari pusat ini diharapkan pemerintah daerah bisa lebih mengalokasikan PAD yang diperolehnya untuk membiayai belanja daerah di daerahnya.

Transfer dari Pemerintah pusat seringkali digunakan sebagai sumber pendanaan utama Pemerintah daerah untuk membiayai operasi utamanya sehari-hari, yang oleh Pemda dilaporkan di perhitungan APBD. Tujuan dari transfer ini adalah untuk mengurangi (kalau tidak mungkin menghilangkan) kesenjangan fiskal antar pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum.

Berdasarkan pada gambaran tersebut maka pemerintah daerah dimungkinkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, dengan melalui APBD yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Hal ini berarti peran pemerintah daerah dalam mempengaruhi kemiskinan melalui kebijakan APBD diharapkan dapat menyelesaikan masalah kemiskinan yang ada dengan cara mengalokasikan anggaran yang mempunyai keterkaitan yang sangat erat dengan permasalahan tersebut.

Berdasarkan adanya fenomena temuan yang ada di DKI Jakarta yang merupakan ibukota Negara dan dengan APBD yang besar seharusnya sudah mampu memaknai penelitian ini selanjutnya mengambil studi kasus DKI Jakarta dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana**

## **Bagi Hasil dan Belanja Daerah Terhadap Tingkat Kemiskinan di DKI Jakarta”.**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah tingkat kemiskinan di DKI Jakarta yang dengan PAD yang tinggi, status sebagai ibukota Negara seharusnya mampu menurunkan angka kemiskinan secara kontinyu. Untuk itu diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai solusi untuk mengurainya.

Sebagai otoritas yang bertanggung jawab untuk menanggulangi kemiskinan, pemerintah seharusnya dapat membantu dalam menghadapi kemiskinan dengan stimulus yang dapat menciptakan lapangan kerja serta menciptakan proyek yang dapat membantu masyarakat miskin dari segi pendapatan melalui perlindungan sosial yang meningkatkan kemampuan masyarakat miskin dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi. Selain itu APBD merupakan instrumen pemerintah yang dapat digunakan untuk memperbaiki indikator-indikator pembangunan manusia sehingga dapat menurunkan kemiskinan.

Didasari latar belakang tersebut muncul pertanyaan penelitian yang dapat dikemukakan adalah :

1. Bagaimana pengaruh PAD terhadap tingkat kemiskinan di DKI Jakarta?
2. Bagaimana pengaruh DAU terhadap tingkat kemiskinan di DKI Jakarta?

3. Bagaimana pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap tingkat kemiskinan di DKI Jakarta?
4. Bagaimana pengaruh Belanja daerah terhadap tingkat kemiskinan di DKI Jakarta?
5. Bagaimana pengaruh PAD, DAU, Dana Bagi Hasil dan Belanja daerah secara bersama-sama terhadap tingkat kemiskinan di DKI Jakarta?

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh PAD terhadap tingkat kemiskinan di DKI Jakarta.
2. Menganalisis pengaruh DAU terhadap tingkat kemiskinan di DKI Jakarta.
3. Menganalisis pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap tingkat kemiskinan di DKI Jakarta.
4. Menganalisis pengaruh Belanja daerah terhadap tingkat kemiskinan di DKI Jakarta.
5. Menganalisis pengaruh PAD, DAU, Dana Bagi Hasil dan Belanja daerah secara bersama-sama terhadap tingkat kemiskinan di DKI Jakarta.

#### **1.3.2. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Sebagai bahan masukan dan rekomendasi bagi pembuat kebijakan yakni pemerintah pusat maupun pemerintah daerah DKI Jakarta sebagai bahan

pertimbangan dalam mengambil kebijakan dalam mendorong perekonomian, pembangunan daerah.

2. Sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya dalam melakukan penelitian yang sejenis dan sumbangan pemikiran tentang, pembangunan ekonomi dan otonomi daerah.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Skripsi ini disusun dengan sistematika penulisan yang terdiri dari, Bab I Pendahuluan, Bab II Telaah Pustaka, Bab III Metodologi Penelitian, Bab IV Hasil dan Pembahasan, Bab V Penutup.

Bab I merupakan pendahuluan yang menjelaskan tentang kemiskinan di provinsi DKI Jakarta dan masalah-masalah yang dihadapi, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II mengemukakan landasan teori kemiskinan, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran teoritis, dan hipotesis penelitian.

Bab III menguraikan variabel penelitian dan definisi operasional, penentuan tahun pengamatan, jenis dan sumber data, serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab IV membahas hasil penelitian yang meliputi deskripsi objek penelitian, hasil analisis data, serta interpretasi hasil dan pembahasan.

Bab V menunjukkan kesimpulan serta saran yang diperoleh dari penelitian pengaruh pengaruh PAD, DAU, DAK dan Belanja Daerah terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta.



## **BAB II**

### **TELAAH PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu**

##### **2.1.1 Kemiskinan**

Definisi menurut UNDP (2009), kemiskinan adalah suatu situasi dimana seseorang atau rumah tangga mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar, sementara lingkungan pendukungnya kurang memberikan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkesinambungan atau untuk keluar dari kerentanan. Pada dasarnya definisi kemiskinan dapat dilihat dari dua sisi, yaitu :

##### **1. Kemiskinan Absolut**

Kemiskinan yang dikaitkan dengan perkiraan tingkat pendapatan dan kebutuhan yang hanya dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang untuk hidup secara layak. Dengan demikian kemiskinan diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan orang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasarnya yakni makanan, pakaian dan perumahan agar dapat menjamin kelangsungan hidupnya. Bank dunia mendefinisikan kemiskinan absolut sebagai hidup dengan pendapatan di bawah USD \$1/hari dan kemiskinan menengah untuk pendapatan di bawah \$2/hari.

##### **2. Kemiskinan Relatif**

Kemiskinan dilihat dari aspek ketimpangan sosial, karena ada orang yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya tetapi masih jauh lebih

rendah dibanding masyarakat sekitarnya (lingkungannya). Semakin besar ketimpangan antara tingkat penghidupan golongan atas dan golongan bawah maka akan semakin besar pula jumlah penduduk yang dapat dikategorikan miskin, sehingga kemiskinan relatif erat hubungannya dengan masalah distribusi pendapatan.

Dalam pengertian umum kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Dalam arti luas, (Chambers dalam Chriswardani Suryawati, 2005 pada Adit Agus Prastyo, 2010: 18) mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu *intergrated concept* yang memiliki lima dimensi, yaitu: 1) kemiskinan (*proper*), 2) ketidakberdayaan (*powerless*), 3) kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*), 4) ketergantungan (*dependence*), dan 5) keterasingan (*isolation*) baik secara geografis maupun sosiologis.

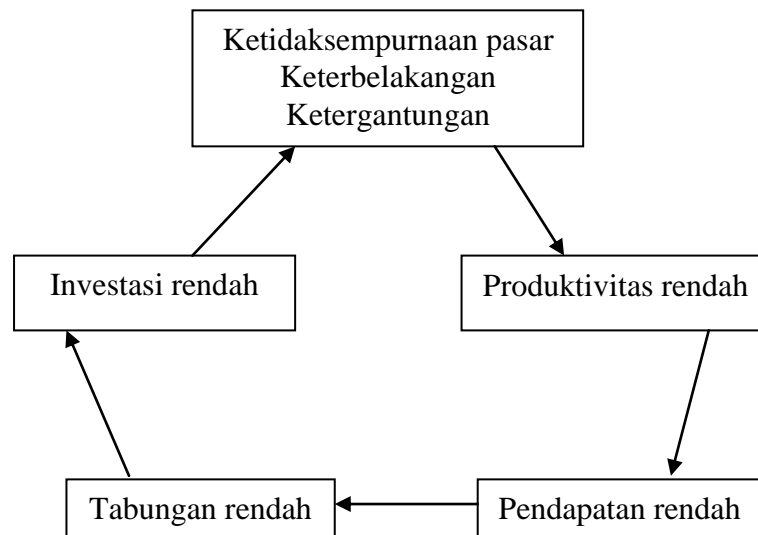
### **2.1.2 Teori Lingkaran Setan Kemiskinan**

Penyebab kemiskinan bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan. Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas menyebabkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi.

Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan, dst. Logika berpikir ini dikemukakan oleh Ragnar Rukse, ekonom pembangunan ternama di tahun

1953, yang mengatakan : “ A poor country is poor because it is poor” (Negara miskin itu karena dia miskin).

**Gambar 2.1**  
**Teori Lingkaran Setan Kemiskinan**



Sumber : Mudrajad Kuncoro, 2006

### **2.1.3 Otonomi Daerah**

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU No. 22 tahun 1999). Otonomi daerah dilaksanakan berdasarkan azas dari desentralisasi yang berarti bahwa penyerahan wewenang pemerintahan kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 22 tahun 1999). Pelaksanaan ini dilakukan untuk memudahkan pemerintah pusat untuk mengkoordinasi setiap daerah dalam pertumbuhan ekonomi dari daerah tersebut

terutama peningkatan atau penurunan Pendapatan Asli Daerah yang sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan otonomi daerah tersebut.

UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah adalah salah satu landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa pengembangan otonomi pada daerah kabupaten dan kota diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Otonomi yang diberikan kepada daerah kabupaten dan kota dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proporsional. Artinya, pelimpahan tanggung jawab akan diikuti oleh pengaturan pembagian, dan pemanfaatan dan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah (Mardiasmo, 2009).

Undang-Undang ini memberikan otonomi secara utuh kepada daerah kabupaten dan kota untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya. Artinya, saat sekarang daerah sudah diberi kewenangan yang utuh dan bulat untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah. Dengan semakin besarnya partisipasi masyarakat ini, desentralisasi kemudian akan mempengaruhi komponen kualitas pemerintahan lainnya. Salah satunya berkaitan dengan pergeseran orientasi pemerintah, dari *command and control* menjadi berorientasi pada tuntutan dan kebutuhan publik. Orientasi yang seperti ini kemudian akan menjadi dasar bagi pelaksanaan peran pemerintah sebagai

*stimulator, fasilitator, koordinator dan entrepreneur* (wirausaha) dalam proses pembangunan (Mardiasmo, 2009).

Dalam penerapannya pemerintah pusat tidak lepas tangan secara penuh dan masih memberikan bantuan kepada pemerintah daerah berupa dana perimbangan yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah dalam pembangunan dan menjadi menjadi komponen pendapatan daerah dalam APBD. Pemerintah daerah harus dapat menjalankan rumah tangganya secara mandiri dan dalam upaya peningkatan kemandirian ini, pemerintah dituntut untuk meningkatkan pelayanan publiknya. Oleh karena itu, anggaran belanja daerah akan tidak logis jika proporsi anggarannya lebih banyak untuk belanja rutin.

Pemberian otonomi daerah akan mengubah perilaku pemerintah daerah untuk lebih efisien dan profesional. Untuk meningkatkan efisiensi dan profesionalisme, Pemerintah daerah perlu melakukan rekayasa ulang terhadap birokrasi yang selama ini dijalankan (*bureaucracy reengineering*). Hal tersebut karena pada saat ini dan di masa yang akan datang pemerintah (pusat dan daerah) akan menghadapi gelombang perubahan baik yang berasal dari tekanan eksternal maupun dari internal masyarakatnya. Untuk Indonesia, perkembangan manajemen dan administrasi publik memang dinilai kurang maju. Tetapi dengan adanya otonomi daerah menyebabkan muncul era baru dalam sistem administrasi pemerintahan dan manajemen publik. Disahkannya UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 memberikan harapan baru bagi pengembangan otonomi yang sebenarnya. Pengembangan otonomi daerah saat ini diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan,

dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah (Mardiasmo, 2009).

Mardiasmo (2009) menjelaskan bahwa momentum otonomi daerah saat ini hendaknya dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pembangunan daerahnya. Untuk itu, hal yang pertama kali perlu dilakukan oleh Pemerintah daerah adalah melakukan perbaikan lembaga (*institutional reform*), perbaikan sistem manajemen keuangan publik, dan reformasi manajemen publik. Oleh karena itu, untuk dapat membangun landasan perubahan yang kuat, pemerintah perlu melakukan perenungan kembali (*rethinking government*) yang kemudian diikuti dengan *reinventing government* untuk menciptakan pemerintah yang baru yang lebih baik.

Pemerintah daerah dan masyarakat pada umumnya cenderung lebih sensitif terhadap penurunan kesejahteraan daripada sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa untuk melakukan penggantian sumber pembiayaan anggaran (*fiscal replacement*), biaya politik atas kenaikan pajak menjadi lebih besar daripada keuntungan politik yang diperoleh pemerintah atas pengurangan pajak. Lebih lanjut, birokrat pemerintah daerah dan masyarakat memandang bahwa kemudahan transfer yang diterima pada saat yang sedang berjalan tetap memiliki nilai sekarang (*present value*) yang lebih tinggi daripada jumlah transfer yang diterima pada waktu-waktu yang akan datang meskipun dengan nilai sekarang yang lebih tinggi. Dengan demikian, fungibilitas transfer tersebut akan memberikan pengaruh konsumsi yang jauh lebih besar. Hal ini memberikan implikasi lebih lanjut bahwa masyarakat akan menggunakan aspek fungibilitas transfer ini untuk mengevaluasi

kinerja pemerintahannya (Hines dan Thaler, 1995; Alderete, dalam Kuncoro, 2007).

#### **2.1.4 Pendapatan Asli Daerah**

Salah satu wujud dari pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing. PAD mencerminkan *local taxing power* yang “cukup” sebagai *necessary condition* bagi terwujudnya otonomi daerah yang luas karena nilai dan proporsinya yang cukup dominan untuk mendanai daerah (Simanjuntak, 2005). Secara teoritis pengukuran kemandirian daerah diukur dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber PAD berasal dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengolahan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan Pendapatan Daerah yang bersumber dari hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada Daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah sebagai perwujudan asas Desentralisasi.

Identifikasi sumber Pendapatan Asli Daerah adalah meneliti, menentukan, dan menetapkan sumber Pendapatan Asli Daerah dengan cara meneliti dan mengusahakan serta mengelola sumber pendapatan tersebut dengan benar sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kebijakan keuangan Daerah

diarahkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber utama Pendapatan Daerah yang dapat dipergunakan oleh Daerah dalam melaksanakan Pemerintahan dan pembangunan Daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari Pemerintah tingkat atas (subsidi). Usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau dari segi Daerah masing-masing tetapi kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia. Pendapatan Asli Daerah itu sendiri dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh Daerah sendiri khususnya keperluan rutin. Peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiap Daerah.

Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, sebagaimana yang disebutkan dalam UU No. 33 Tahun 2004 yaitu Daerah dilarang menetapkan peraturan Daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan menetapkan peraturan Daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar Daerah, dan kegiatan impor/ekspor. Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana diatur dalam UU No. 33 Tahun 2004 yaitu:

- 1) Pajak Daerah

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak



mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyatnya.

Menurut Mardiasmo (2009) jenis Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

1. Pajak Daerah Provinsi yang terdiri dari:
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air sebesar 5%;
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air sebesar 10%;
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar 5%;
  - d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan sebesar 20%.
2. Pajak Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari:
  - a. Pajak Hotel sebesar 10%;
  - b. Pajak Restoran sebesar 10%;
  - c. Pajak Hiburan sebesar 35%;
  - d. Pajak Reklame sebesar 25%;
  - e. Pajak Penerangan Jalan sebesar 10%;
  - f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C sebesar 20%;
  - g. Pajak Parkir sebesar 20%.

## 2) Retribusi Daerah

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagian pembayaran atas jasa atau

pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut Mardiasmo (2009) jenis Retribusi Daerah dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat;
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- f. Retribusi Pelayanan Pasar;
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- j. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.

2. Retribusi Jasa Usaha

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c. Retribusi Tempat Pelelangan;
- d. Retribusi Terminal;
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;

- g. Retribusi Penyedotan Kakus;
  - h. Retribusi Rumah Potong Hewan;
  - i. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal;
  - j. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
  - k. Retribusi Penyeberangan di Atas Air;
  - l. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
  - m. Retribusi Penjualan Produksi Daerah.
3. Retribusi Perizinan Tertentu
- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
  - b. Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
  - c. Retribusi Izin Gangguan;
  - d. Retribusi Izin Trayek.

### 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan Daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan (Halim, 2008). Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Daerah/BUMD,
- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN,
- c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta/kelompok usaha masyarakat.

#### 4) Lain-lain PAD yang Sah

Pendapatan ini merupakan penerimaan Daerah yang berasal dari lain-lain Pemda. Rekening ini disediakan untuk mengakuntansikan penerimaan Daerah selain yang disebut di atas (Halim, 2008). Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut:

- a. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dapat dipisahkan;
- b. Jasa giro;
- c. Pendapatan bunga;
- d. Penerimaan atas tuntutan ganti rugi keuangan Daerah;
- e. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang dan jasa oleh Daerah;
- f. Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- h. Pendapatan denda pajak;
- i. Pendapatan denda retribusi;
- j. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- k. Pendapatan dari pengembalian;
- l. Fasilitas sosial dan umum;
- m. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- n. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan;

Secara konseptual, perubahan pendapatan akan berpengaruh terhadap belanja atau pengeluaran, namun tidak selalu seluruh tambahan pendapatan tersebut akan dialokasikan dalam belanja. Abdullah & Halim (2004) menemukan

bahwa sumber pendapatan daerah berupa PAD dan dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja daerah secara keseluruhan. Meskipun proporsi PAD maksimal hanya sebesar 10% dari total pendapatan daerah, kontribusinya terhadap pengalokasian anggaran cukup besar, terutama bila dikaitkan dengan kepentingan politis.

PAD suatu daerah umumnya mencerminkan kemakmuran (*wealth*) dari pemerintah daerah ataupun propinsi. Peningkatan PAD merupakan salah satu sumber pendanaan daerah untuk dengan peningkatan kualitas layanan publik (Adi, 2006). Kualitas layanan publik yang baik akan mencerminkan kinerja suatu pemerintah daerah untuk meningkatkan nilai PAD, akan berdampak pada peningkatan kemakmuran penduduk.

Peningkatan PAD akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Adanya kenaikan PAD akan memicu dan memacu pertumbuhan ekonomi daerah menjadi lebih baik daripada pertumbuhan ekonomi daerah sebelumnya. Kenaikan PAD juga dapat mengoptimalkan dan meningkatkan aktivitas pada sektor-sektor yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi, seperti sektor industri dan perdagangan, sektor jasa, dan sektor-sektor lainnya.

#### **2.1.5 Dana Alokasi Umum**

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah pada hakekatnya mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan Daerah, sebagai konsekuensi dari adanya pembagian tugas antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah. Perimbangan keuangan antara Pemerintah pusat dan Daerah merupakan suatu sistem yang menyuruh dalam rangka penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi, maupun tugas pembantuan.

Pentingnya Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat untuk Pemerintah Daerah adalah untuk menjaga atau menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum di seluruh negeri. Implemementasi Dana Perimbangan merupakan konsekuensi dari tidak meratanya kemampuan keuangan dan ekonomi Daerah. Selain itu, tujuan dari Dana Perimbangan adalah mengurangi kesenjangan keuangan horizontal antar-Daerah, mengurangi kesenjangan vertikal Pusat-Daerah, mengatasi persoalan efek pelayanan publik antar-Daerah dan untuk menciptakan stabilitas aktivitas perekonomian di Daerah. Bentuk Dana Perimbangan di Indonesia yang paling penting selain Dana Bagi Hasil (DBH) adalah Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Berdasarkan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Alokasi Umum adalah sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap Daerah Otonom (Provinsi/Kabupaten/Kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. Dana Alokasi Umum yang merupakan penyangga utama pembiayaan APBD sebagian besar untuk belanja pegawai, sehingga belanja untuk proyek-proyek pembangunan menjadi sangat berkurang.

Prinsip dasar alokasi Dana Alokasi Umum terdiri dari:

1. Kecukupan (*Adequacy*)
2. Netral dan efisien (*Neutrality and efficiency*)
3. Akuntabilitas (*Accountability*)
4. Relevansi (*Relevancy*)
5. Keadilan (*Equity*)
6. Objektivitas dan transparansi (*Objectivity and transparansi*)
7. Kesederhanaan (*Simplicity*)

Peraturan Pemerintah Daerah yang mengatur Dana Alokasi Umum yaitu Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2004 tentang bagaimana Pengelolaan Dana Alokasi Umum, pembuatan rumus dana alokasi umum harus memenuhi kaidah-kaidah dasar yang telah dicantumkan dalam UU No. 33 Tahun 2004. Salah satu kaidah yang terpenting adalah bahwa Dana Alokasi Umum dialokasikan kepada Daerah dengan menggunakan bobot Daerah itu sendiri harus dirumuskan dengan menggunakan suatu formula yang didasarkan atas pertimbangan kebutuhan dan potensi penerimaan Daerah.

### **2.1.6 Dana Bagi Hasil**

Dana bagi hasil (*revenue sharing*) atau DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. DBH dilaksanakan dengan prinsip menurut sumbernya, dalam arti bahwa bagian daerah atas penerimaan yang dibagihasilkan didasarkan atas daerah penghasil. Prinsip tersebut berlaku untuk semua komponen DBH, kecuali DBH perikanan yang dibagi sama rata ke seluruh kabupaten/kota. Selain itu, penyaluran DBH baik pajak maupun SDA dilakukan berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan. Berdasarkan sumbernya DBH dibedakan dalam DBH Perpajakan dan DBH Sumber Daya Alam (DBH SDA). DBH yang bersumber dari pajak terdiri atas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.

Alokasi DBH Perpajakan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan. Setiap awal tahun anggaran Menteri Keuangan menetapkan alokasi sementara DBH Perpajakan yang menjadi dasar penerbitan DIPA untuk penyaluran Triwulan I, II dan III atau Tahap I/II atas bagian pemerintah pusat yang disalurkan kembali ke daerah dan atas bagian daerah. Pada akhir tahun anggaran Menteri Keuangan menetapkan Alokasi Definitif DBH Perpajakan yang merupakan dasar penerbitan DIPA untuk penyaluran pada Triwulan/Tahap akhir.



### **2.1.7 Belanja Daerah**

Belanja Daerah menurut PP No. 58 Tahun 2005 adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban Daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah. Menurut Ainur (2007) Belanja Daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran Daerah yang di alokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pasal 25 disebutkan, sumber pendapatan Daerah yang digunakan untuk membiayai Belanja Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Penerimaan yang Sah

Dalam struktur APBD yang berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006, belanja dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Kelompok Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Selanjutnya, kelompok Belanja Tidak Langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:

#### **1) Belanja Pegawai**

Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2) Belanja Bunga

Belanja Bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga uang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

3) Belanja Subsidi

Belanja Subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual. Produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

4) Belanja Hibah

Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukkannya.

5) Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

6) Belanja Bagi Hasil

Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pendapatan Provinsi kepada Kabupaten/Kota atau pendapatan Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa atau Pendapatan Pemerintah

Daerah tertentu kepada Pemerintah Daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

7) Bantuan Keuangan

Bantuan Keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan Kepada Pemerintah Daerah lainnya atau dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

8) Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atau kelebihan penerimaan.

Kelompok Belanja Langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:

1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dalam kelompok belanja langsung tersebut dimaksudkan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah.

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah.

### 3) Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintahan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

#### **2.1.8 Penelitian Terdahulu**

Anis Setiawati (2007), menguji pengaruh PAD, DAU, DAK dan Belanja Pembangunan terhadap Pertumbuhan Kemiskinan dan Pengangguran. PAD, DAU, DAK dan Belanja pembangunan digunakan sebagai faktor yang mempengaruhi Pertumbuhan daerah, Kemiskinan dan Pengangguran. Data penelitian selama 2001 – 2005 digunakan sebagai dasar analisis. Hasil pengujian mendapatkan bahwa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah PAD dengan arah positif dan DAK dan DAU dengan arah negatif. Untuk pengujian secara langsung pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan dan pengangguran berpengaruh menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan, tetapi pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan dan berpengaruh positif terhadap pengangguran.

Budi Santosa (2013), menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Daerah terhadap Pertumbuhan, Pengangguran dan Kemiskinan 33 Propinsi di Indonesia. PAD, DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil (DBH) digunakan sebagai faktor yang mempengaruhi Pertumbuhan daerah, Pengangguran dan

Kemiskinan. Data penelitian selama 2007 – 2011 digunakan sebagai dasar analisis. Hasil pengujian PAD dan DAU tidak berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, sedangkan DAK dan DBH berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. PAD dan DAU berpengaruh terhadap penurunan jumlah pengangguran daerah, namun DAK dan DBH tidak berpengaruh terhadap penurunan jumlah pengangguran daerah. • PAD, DAU, DAK dan DBH berpengaruh terhadap jumlah kemiskinan daerah, berbeda dengan halnya pertumbuhan ekonomi daerah, yang mana tidak berpengaruh terhadap penurunan pengangguran dan kemiskinan daerah. Pengaruh antar variabel secara tidak langsung tidak terdapat pengaruh baik PAD, DAU, DAK dan DBH terhadap penurunan pengangguran maupun kemiskinan melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Meilen Greri Paseki, Amran Naukoko, Patrick Wauran (2014), meneliti mengenai Pengaruh Dana Alokasi Umum Dan Belanja Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Kemiskinan Di Kota Manado Tahun 2004-2012. Hasil yang diperoleh adalah bahwa Pengaruh Variabel Dana Alokasi Umum, Belanja Langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi secara gabung tidak memiliki pengaruh. Pengaruh Variabel Dana Alokasi Umum terhadap Kemiskinan secara langsung memiliki pengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Kota Manado, dan pengaruh belanja langsung terhadap kemiskinan secara langsung memiliki pengaruh signifikan dalam menurunkan tingkat kemiskinan di Kota Manado. DAU dan Belanja Langsung dapat

berpengaruh langsung terhadap kemiskinan, dan juga tidak langsung berpengaruh melalui pertumbuhan ekonomi sebagai variabel *intervening*.

Persamaan dengan penelitian sebelumnya adalah meneliti variabel yang hampir sama yaitu variabel yang berkaitan dengan APBD yaitu PAD, DAU, DBH dan belanja daerah sebagai *predictor* kemiskinan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah hasil dari penelitian berbeda. Perbedaan secara keseluruhan adalah penelitian tentang APBD dan angka kemiskinan di DKI Jakarta pada tahun 2003-2014.

NAMA	JUDUL	VARIABEL DAN ALAT ANALISIS	HASIL PENELITIAN
Anis Setiawati dan Ardi Hamzah, (2007)	Analisis PAD, DAU, DAK, Belanja Pembangunan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Pengangguran	<b>Variabel :</b> PAD, DAU, DAK, Belanja Pembangunan, Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, Pengangguran  <b>Alat Analisis :</b> <i>Path analysis</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil pengujian faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah PAD dengan arah positif dan DAK dan DAU dengan arah negatif.</li> <li>• Untuk pengujian secara langsung pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan dan pengangguran berpengaruh menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan, tetapi pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan dan berpengaruh positif terhadap pengangguran.</li> </ul>
Budi Santosa (2013)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Daerah terhadap Pertumbuhan, Pengangguran dan Kemiskinan 33 Propinsi di Indonesia	<b>Variabel :</b> PAD, DAU, DAK, DBH, Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Kemiskinan  <b>Alat Analisis :</b> <i>Path Analysis</i> dengan program AMOS 18	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PAD dan DAU tidak berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, sedangkan DAK dan DBH berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.</li> <li>• PAD dan DAU berpengaruh terhadap penurunan jumlah pengangguran daerah, namun DAK dan DBH tidak berpengaruh terhadap penurunan jumlah pengangguran daerah.</li> <li>• PAD, DAU, DAK dan DBH berpengaruh terhadap jumlah kemiskinan daerah, berbeda dengan</li> </ul>

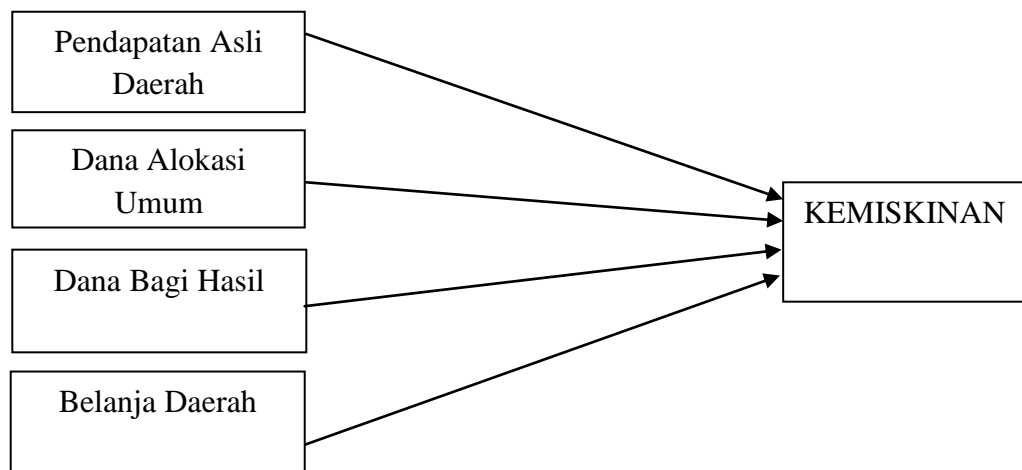
			<p>halnya pertumbuhan ekonomi daerah, yang mana tidak berpengaruh terhadap penurunan pengangguran dan kemiskinan daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaruh antar variabel secara tidak langsung tidak terdapat pengaruh baik PAD, DAU, DAK dan DBH terhadap penurunan pengangguran maupun kemiskinan melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah</li> </ul>
Meilen Greri Paseki, Amran Naukoko, Patrick Wauran, (2014)	Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Belanja Langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya Terhadap Kemiskinan di Kota Manado Tahun 2004-2012	<p><b>Variabel :</b> DAU, Belanja Langsung, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kemiskinan</p> <p><b>Alat Analisis :</b> Regresi sederhana, regresi berganda dan <i>Path analysis</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dana Alokasi Umum dan Belanja Langsung tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara langsung.</li> <li>• Dana Alokasi Umum secara langsung berpengaruh pada penurunan tingkat kemiskinan di Kota Manado.</li> <li>• Belanja Langsung secara langsung berpengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Kota Manado.</li> <li>• Dana Alokasi Umum, Belanja langsung dan pertumbuhan ekonomi secara bersama memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kota Manado</li> <li>• DAU dan Belanja Langsung dapat berpengaruh langsung terhadap kemiskinan, dan juga tidak langsung berpengaruh melalui pertumbuhan ekonomi sebagai variabel <i>intervening</i>.</li> </ul>



## 2.2 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan penulis, dimunculkan kerangka berfikir untuk menjelaskan pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana bagi hasil dan belanja daerah terhadap tingkat kemiskinan di DKI Jakarta. Berikut gambar pemikiran yang skematis :

**Gambar 2.2**  
**Kerangka Pemikiran**



## 2.3 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara/kesimpulan yang diambil untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam suatu penelitian yang sebenarnya masih harus diuji secara empiris. Hipotesis yang dimaksud merupakan dugaan yang mungkin benar atau mungkin salah.

Dengan mengacu pada dasar pemikiran yang bersifat teoritis dan berdasarkan studi empiris yang pernah dilakukan berkaitan dengan penelitian dibidang ini, maka akan diajukan hipotesis sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan
2. Dana Alokasi Umum mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan.
3. Dana Bagi Hasil mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.
4. Belanja Daerah mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional**

Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011: 38). Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kemiskinan sebagai variabel terikat sedangkan variabel bebasnya adalah pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana bagi hasil dan belanja daerah.

Adapun definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Kemiskinan adalah ketidakmampuan memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makan maupun non makan. Data kemiskinan yang dipakai dalam penelitian ini adalah data kemiskinan DKI tahun 2002-2013 (Dalam Persen) yang diperoleh dari Data BPS DKI Jakarta.
- b. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperoleh dari BPS DKI Jakarta
- c. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan

kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum diperoleh dari BPS DKI Jakarta

- d. Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan pajak dan pendapatan in pajak daAPBN yang dialokasikan dengan tujuan pembiayaan khusus di daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil diperoleh dari BPS DKI Jakarta
- e. Belanja Daerah, yaitu semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja Daerah diperoleh dari BPS DKI Jakarta

### **3.2. Jenis dan Sumber Data**

Untuk mencapai tujuan penelitian dalam menganalisis tingkat kemiskinan, jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. Data kuantitatif terdiri dari data PAD, DAU, DBH, Belanja Daerah dan angka kemiskinan di DKI Jakarta. Data yang digunakan berupa tahun periode 2002 – 2013. Sedangkan data yang digunakan sebagai observasi adalah data deret waktu (*time-series data*) untuk kurun waktu tahun tahun 2002 – 2013 di Provinsi DKI Jakarta dan menghasilkan 12 observasi.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi atau sudah dikumpulkan dari sumber lain dan diperoleh dari pihak lain seperti buku-buku literatur, catatan-catatan atau sumber yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

### 3.3 Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam penelitian ini sepenuhnya melalui data sekunder. Data yang diperoleh merupakan data-data dari literatur yang berkaitan baik berupa, dokumen, artikel, catatan-catatan, maupun arsip. Data yang diperoleh kemudian disusun dan diolah sesuai dengan kepentingan dan tujuan penelitian. Untuk tujuan penelitian ini data yang dibutuhkan adalah data di Provinsi DKI Jakarta yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta.

### 3.4. Metode Analisis

Penelitian ini mengistimasi pengaruh PAD, DAU, DBH dan Belanja Daerah terhadap kemiskinan di Propinsi DKI Jakarta. Data yang digunakan adalah data time series selama 12 tahun terakhir yakni tahun 2002–2013. Fungsi persamaan model regresi data time series tersebut dapat dituliskan sebagai berikut :

$$POV_t = \beta_0 + \beta_1 PAD_t + \beta_2 DAU_t + \beta_3 DBH_t + \beta_4 BD_t \dots \dots \dots (3.1)$$

Keterangan

POV = Tingkat Kemiskinan di Jakarta

PAD = Pendapatan Asli Daerah

DAU = Dana Alokasi Umum

DBH = Dana Bagi Hasil

BD = Belanja Daerah

$\beta_0$  = intercept

$\beta_1 - \beta_4$  = koefisien regresi variabel independent

$\mu_{it}$  = Error Term

### **3.4.1. Deteksi Penyimpangan Asumsi Klasik**

Deteksi asumsi klasik dilakukan untuk mendapatkan model regresi yang baik, model regresi tersebut harus terbebas dari adanya penyakit-penyakit seperti: normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, heteroskedastisitas, dan data haruslah terdistribusi secara normal. Cara yang digunakan untuk menguji penyimpangan asumsi klasi adalah sebagai berikut :

#### **3.4.1.1 Deteksi Normalitas**

Menurut Ghozali (2009) deteksi normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel terikat dan variabel bebas mempunyai distribusi normal atau tidak dalam model regresi. Model regresi yang baik adalah memiliki data yang terdistribusi secara normal atau mendekati normal.

Dalam penelitian ini guna mendeteksi apakah data terdistribusi secara normal atau tidak, maka dilakukan dengan cara melakukan uji *Jarque-Bera*, yaitu membandingkan nilai *Jarque-Bera* yang diperoleh dengan nilai  $\chi^2$  (*Chi-square*) tabel. Apabila nilai *Jarque-Bera* lebih kecil dibanding nilai  $\chi^2$  (*Chi-square*) tabel, maka model kemiskinan terdistribusi secara normal.

#### **3.4.1.2 Deteksi Multikolinearitas**

Menurut Ghozali (2009), deteksi multikolineartias bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Model regresi yang baik dicerminkan dengan tidak adanya korelasi antara variabel bebas, namun apabila terindikasi adanya

korelasi, maka variabel tersebut ortogonal, maksudnya variabel bebas yang nilai korelasi antar sesama variabel bebas sama dengan nol.

Penelitian ini dalam mendeteksi ada tidaknya gejala multikolinearitas, dilakukan dengan cara membandingkan nilai regresi parsial (*auxiliary regressions*) dengan nilai regresi utama pada model kemiskinan. Apabila nilai estimasi  $R^2$  utama pada model kemiskinan lebih besar dibanding nilai  $R^2$  *auxiliary regressions*, maka model kemiskinan terbebas dari penyakit multikolinearitas.

#### **3.4.1.3 Deteksi Autokorelasi**

Menurut Ghozali (2009), Uji Autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi linear memiliki korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t - 1$  (sebelumnya), dimana jika terjadi korelasi dinamakan ada masalah autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data runtut waktu (time series). Salah satu cara yang digunakan untuk mendeteksi adalah dengan uji *Breusch-Godfrey (BG Test)*.

Dalam penelitian ini guna mendeteksi ada tidaknya gejala autokorelasi, maka dilakukan dengan cara melakukan uji *Breusch-Godfrey*, yaitu membandingkan nilai  $Obs * R-squared$  hasil uji *Breusch-Godfrey* dengan nilai  $\chi^2$  (*Chi-square*) tabel. Apabila nilai  $Obs * R-squared$  hasil uji *Breusch-Godfrey*

lebih kecil dibanding nilai  $\chi^2$  (*Chi-square*) tabel, maka model kemiskinan terbebas dari penyakit autokorelasi.

#### **3.4.1.4 Deteksi Heteroskedastisitas**

Menurut Ghozali (2005) deteksi heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadinya heteroskedastisitas.

Dalam penelitian ini guna mendeteksi ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas, maka dilakukan dengan cara melakukan uji *White*, yaitu membandingkan nilai *Obs\*R-squared* hasil uji *White* dengan nilai  $\chi^2$  (*Chi-square*) tabel. Apabila nilai *Obs\*R-squared* hasil uji *White* lebih kecil dibanding nilai  $\chi^2$  (*Chi-square*) tabel, maka model kemiskinan terbebas dari penyakit heteroskedastisitas.

#### **3.4.2 Pengujian Statistik**

##### **3.4.2.1 Koefisien Determinasi (Uji $R^2$ )**

Bertujuan mengukur kebaikan suatu model (*goodness of fit*) digunakanlah koefisien determinasi ( $R^2$ ). Koefisien determinasi ( $R^2$ ) merupakan angka / nilai yang memberikan proporsi atau persentase variasi total dalam variabel dependen (Y) yang mampu dijelaskan oleh variabel independen (X) (Gujarati, 2009). Nilai  $R^2$  berkisar antara nol dan satu ( $0 < R^2$ ). Nilai  $R^2$  yang kecil atau mendekati nol berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Sebaliknya, jika nilai  $R^2$  mendekati nilai satu berarti



variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen, dan model tersebut dapat dikatakan baik (Gujarati, 2009).

### 3.4.2.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F merupakan pengujian yang dilakukan guna mengetahui pengaruh secara bersama-sama semua variabel independen yang terdapat pada model terhadap variabel dependen. Hipotesis yang digunakan sebagai berikut :

$H_0 : \beta_0 = \beta_0 = \beta_0 = \beta_0 = \beta_0 = 0,$                       tidak ada pengaruh dari semua variable  
independen terhadap variabel dependen  
Secara bersama-sama

$H_0 : \beta_0 = \beta_0 = \beta_0 = \beta_0 = \beta_0 = 0,$                       terdapat pengaruh dari semua variabel  
Independen terhadap variabel dependen  
secara bersama-sama

Uji F dapat dilakukan dengan membandingkan antara nilai F hitung dengan F tabel, dimana nilai F hitung dapat dipenuhi dengan formula sebagai berikut :

$$F = \frac{R^2 / (k-1)}{(1 - R^2) / (n-k)} \dots\dots\dots (3.2)$$

dimana :

$R^2$  : koefisien determinasi

k : jumlah varabel independen termasuk konstanta

n : jumlah sampel

Apabila nilai F hitung > F tabel maka  $H_0$  ditolak dan menerima  $H_1$ .

Artinya ada pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel

dependen, dan sebaliknya bila,  $F_{hitung} < F_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak (Ghozali, 2009).

### 3.4.2.3 Uji Signifikansi Individu (Uji t)

Uji t dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2009). Guna menguji adanya pengaruh variabel independen terhadap dependen secara individu pada tingkat signifikansi 5 persen dengan pengujian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak, artinya salah satu variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.
2. Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  maka  $H_0$  tidak ditolak, artinya salah satu variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.

Untuk menguji hipotesis tersebut digunakan statistik t, dimana nilai t hitung dapat diperoleh dengan formula sebagai berikut :

$$t = \frac{b_j}{se(b_j)} \dots \dots \dots (3.3)$$

Dimana :

$b_j$  = koefisien regresi

$se(b_j)$  = *standar error*

Koefisien regresi Uji t ini dilakukan dengan membandingkan t-hitung dengan t-tabel. Apabila  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka hipotesis alternatif diterima yang menyatakan bahwa variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen. Sebaliknya apabila  $t_{hitung} < t_{tabel}$  maka variabel independen secara individual tidak mempengaruhi variabel dependen.